



RENCANA KERJA

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
(BPKAD)**

PROVINSI JAMBI

KANTOR GUBERNUR JAMBI

TAHUN 2015

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan *good governance*, maka Pemerintah melalui setiap Satuan kerja Perangkat Daerah secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas, fungsi dan kinerjanya. Dengan kondisi ini diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi keuangan terhadap publik. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Jambi menyusun Rencana Kerja Tahun 2015 dengan mengacu kepada Perencanaan Startegis 2010 -2015 dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2015 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Biro Keuangan Propinsi Jambi dan Biro Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah Propinsi Jambi Tahun 2013, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra , dana Indikatif beserta sumbernya serta perkiraan maju berdasarkan pagu Indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Rencana Kerja ini merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2015 dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna

menjawab dinamika yang menjadi perkembangan keuangan baik target dan realisasinya. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun swasta yang membutuhkannya.

Jambi, Maret 2014

MUSLIM RIZAL, SE.M.Si
Pembina
NIP. 19600416 198403 1 002

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Jambi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Pasal 18 BPKAD bertugas yakni melaksanakan penyusunan dan kebijakan Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan dan Aset

Berdasarkan tugas tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Jambi mempunyai fungsi :

- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang keuangan dan aset lingkup Pemerintahan Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- b. Pelaksanaan pelayanan madministratif dan kegiatan keuangan dan aset daerah;
 - c. Penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan di bidang keuangan dan aset daerah;
 - d. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangann dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Badan Pengelolaaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Anggaran;
 - d. Bidang Perbendaharaan;
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
 - f. Bidang Pengelolaan Aset;
 - g. Bidang Penatausahaan Aset;
 - h. UPTB; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional

- Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Jambi mempunyai peran yang amat strategis dalam menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang keuangan dan aset lingkup Pemerintah Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencapaian Laporan Keuangan Pemerintah Propinsi Jambi dengan predikat tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) pada Tahun 2012, diharapkan tetap akan dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya.

Untuk dapat mempertahankan opini tertinggi dalam Laporan Keuangan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi menyusun Rencana Kerja Tahun 2015 dengan maksud meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Jambi didalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Perda Nomor 16 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tanggal 10 Desember 2008;
14. Perda Nomor 6 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025;
15. Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015;
16. Perda Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan tahun 2013, dan pelaksanaan program / kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi tahun 2015.

Sedang tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan program / kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Propinsi Jambi Tahun 2015.

1.4 Sistematika Penulisan.

Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ditulis kedalam sebuah dokumen deskriptif yang memuat data kualitatif dan kuantitatif, yang terdiri dari 7 bab, yang meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Renja.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Bab ini memuat :

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor – faktor penyebab yang tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program rensra SKPD; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD BIRO KEUANGAN PROPINSI JAMBI DAN BIRO PENGELOLAAN ASSET DAN KEKAYAAN DAERAH PROPINSI JAMBI TAHUN 2013

Pada tahun anggaran 2013 yang tertuang dalam program dan kegiatan Biro Keuangan Propinsi Jambi telah dianggarkan sebesar Rp.7.552.619.850,- yaitu pada APBD Murni berupa belanja langsung sebesar Rp.6.802.619.850,- dan APBD Perubahan sebesar Rp.7.552.619.850,- yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Biro Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah Propinsi Jambi telah dianggarkan sebesar Rp.10.618.221.150,- yaitu pada APBD Murni berupa belanja langsung sebesar Rp.8.051.221.150,- dan APBD Perubahan sebesar Rp.11.351.221.150,- yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jambi mengajukan usulan 5 program yang terinci ke dalam 25 kegiatan.

Adapun anggaran untuk belanja langsung yang diusulkan pada tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

| Program / Kegiatan | Usulan Anggaran Tahun 2013 | Plafon Indikatif | Keterangan |
|--|-----------------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | | | |
| Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD | Rp. 836.970.800 | Rp. 836.970.800 | ABT (Rp. 85.000.000) |
| Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | Rp. 537.024.000 | Rp. 537.024.000 | ABT (Rp. 30.000.000) |
| Kegiatan Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | Rp. 374.189.980 | Rp. 374.189.980 | ABT (Rp. 15.000.000) |
| Kegiatan Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah | Rp. 777.705.830 | Rp. 777.705.830 | ABT (Rp. 90.000.000) |
| Kegiatan Sosialisasi dan Bintek Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp. 762.223.100 | Rp. 762.223.100 | ABT (Rp. 37.100.000) |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|---|
| Kegiatan Penatausahaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Rp. 936.500.200 | Rp. 936.500.200 | ABT (Rp.191.268.000) |
| Kegiatan Peningkatan Manajemen Unit Akuntansi Wilayah | Rp. 299.413.360 | Rp. 299.413.360 | ABT (Rp. 15.000.000) |
| Kegiatan Pengelolaan Administrasi TUKD Belanja Tidak Langsung | Rp. 526.808.830 | Rp. 526.808.830 | ABT (Rp. 82.700.000) |
| Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah | Rp. 340.862.560 | Rp. 340.862.560 | ABT (Rp. 65.000.000) |
| Kegiatan Pengelolaan Administrasi TUKD Belanja Langsung | Rp. 674.571.690 | Rp. 674.571.690 | ABT (Rp. 79.432.000) |
| Kegiatan Optimalisasi Dana Proyek Pemerintah Daerah Desentralisasi (P2D2) | Rp. 436.218.000 | Rp. 436.218.000 | |
| | | | |
| Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota | | | |
| Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang APBD Kabupaten / Kota | Rp. 615.625.500 | Rp. 615.625.500 | Murni Rp. 590.625.500 dan ABT Rp. 25.000.000 |
| Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Perhitungan APBD Kabupaten / Kota | Rp. 434.506.000 | Rp. 434.506.000 | Murni Rp. 400.006.000 dan ABT Rp. 34.500.000 |
| | | | |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | |
| Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas | Rp. 2.125.942.000 | Rp. 2.125.942.000 | Murni Rp. 1.965.000.000 dan ABT Rp. 160.942.000 |
| | | | |
| Program Peningkatan Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah | | | |
| Kegiatan Penilaian Asset Provinsi Jambi | Rp. 345.045.100 | Rp. 345.045.100 | Murni Rp. 273.160.800 dan ABT Rp. 71.884.300 |
| Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Asset dan Penyusunan Laporan | Rp. 275.388.000 | Rp. 275.388.000 | Murni Rp. 227.833.000 dan ABT Rp. 47.555.000 |
| Kegiatan Peningkatan Sarana Pengelolaan Asset | Rp. 2.198.319.556 | Rp. 2.198.319.556 | Murni Rp. 432.830.778 dan ABT Rp. 1.765.488.778 |
| | | | |
| Program Pengelolaan Kekayaan Daerah | | | |
| Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah Provinsi Jambi | Rp. 1.208.335.932 | Rp. 1.208.335.932 | Murni Rp. 1.021.343.000 dan ABT Rp. 186.992.932 |
| Kegiatan Pengadaan dan Pengamanan Asset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi | Rp. 1.726.443.832 | Rp. 1.726.443.832 | Murni Rp. 1.434.326.982 dan ABT Rp. 292.116.850 |
| Kegiatan Penyusunan RKBMD dan RKPBM | Rp. 296.820.000 | Rp. 296.820.000 | Murni Rp. 236.094.000 dan ABT Rp. 60.726.000 |
| Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Asset | Rp. 356.112.800 | Rp. 356.112.800 | Murni Rp. 326.112.800 dan ABT Rp. 30.000.000 |
| Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Asset | Rp. 754.719.200 | Rp. 754.719.200 | Murni Rp. 697.909.400 dan ABT Rp. 56.809.800 |
| Kegiatan Pemanfaatan Asset Pemerintah Provinsi Jambi | Rp. 735.066.880 | Rp. 735.066.880 | Murni Rp. 551.243.440 dan ABT Rp. 183.823.440 |
| Kegiatan Penghapusan dan Pemindahtanganan | Rp. 848.961.000 | Rp. 848.961.000 | Murni Rp. 453.793.600 dan ABT Rp. 395.167.400 |
| Kegiatan Pelayanan Administrasi Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah | Rp. 480.066.850 | Rp. 480.066.850 | Murni Rp. 431.573.350 dan ABT Rp. 48.493.500 |

Adapun Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Realisasi program/kegiatan yang

telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, factor – factor penyebab yang tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, Implikasi yang timbul terhadap target capaian program rensra SKPD dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor faktor penyebab tersebut dapat dilihat tabel berikut :

PROGRAM / KEGIATAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET PROVINSI JAMBI TAHUN 2013

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN/ ANGGARAN | YANG TELAH DILAKSANAKAN | CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN | KENDALA/ PERMASALAHAN | SOLUSI/SARAN | TOTAL DANA DALAM DPA (Rp) | DAYA SERAP KEUANGAN | |
|----|--|---|--|---|--|---------------------------------|------------------------|--------|
| | | | | | | | (Rp) | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD | Penyusunan APBD Murni | Tersusunnya Perda Tentang APBD | Pengumpulan data yang tidak tepat waktu- | Meningkatkan Koordinasi | 836.970.800 | 821.946.191 | 98% |
| 2 | Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | Penyusunan APBD Perubahan | Tersusunnya Perda Tentang Perubahan APBD | - | - | 537.024.000 | 427.563.800 | 80% |
| 3. | Kegiatan Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban | Penyusunan Perda Pertanggungjawaban APBD | Tersusunnya Perda Tentang Pertanggung Jawaban APBD | Data-data Laporan Dari SKPD Yang belum tepat waktu | Memaksimalkan Pengumpulan Data | 374.189.980 | 276.565.230 | 74% |
| 4. | Kegiatan Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah | Terpeliharanya sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | Terwujudnya tertip Administrasi sistim informasi Keuangan Daerah | Koneksi Jaringan kurang Lancar | Meningkatkan kapasitas jaringan | 777.705.830 | 538.336.300 | 69% |
| 5. | Kegiatan Sosialisasi dan BinteK Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah | Sosialisasi dan BinteK Paket Regulasi Tentang pengelolaan Keuangan daerah | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan SKPD | Pemahaman SDM Pengelola Keuangan yang belum optimal | Penempatan SDM yang sesuai dengan kompetensi | 762.223.100 | 568.715.875 | 74.61% |
| 6. | Kegiatan Penatausahaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Pelayanan Administrasi Keuangan | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan | Sarana dan Prasarana yang belum memadai | Peningkatan Sarana dan Prasarana | 936.500.200 | 780.347.650 | 83.33% |
| 7. | Kegiatan Peningkatan Manajemen Unit Akuntansi Wilayah | Penyusunan laporan keuangan Dana Dekonsentrasi dan tugas pembantuan | Terwujudnya Laporan Keuangan Dana Dekon TP yang tepat waktu | Penyampaian Laporan SKPD terkait yang belum tepat waktu | Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait | 299.413.360 | 281.395.400 | 93.98% |
| 8. | Kegiatan Pengelolaan Administrasi TUKD Belanja Tidak Langsung | Pelayanan Administrasi Keuangan Belanja Tidak Langsung | Terlaksananya TUKD Belanja Tidak Langsung | | | 526.808.830 | 520.308.718 | 98.77% |
| 9. | Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah | Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah | Terciptanya Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah yang cepat, tepat dan akurat | | | 340.862.560 | 324.050.800 | 95.07% |

| | | | | | | | | |
|-----|--|---|---|---|---|---------------|---------------|--------|
| 10. | Kegiatan Pengelolaan Administrasi TUKD Belanja Langsung | Pelayanan Administrasi Keuangan Belanja Langsung | Terlaksananya TUKD Belanja Langsung | - | - | 674.571.690 | 670.052.300 | 99.33% |
| 11. | Kegiatan Optimalisasi Dana Proyek Pemerintah Daerah Desentralisasi (P2D2) * | Penyusunan Laporan Dana Alokasi Khusus | Penyampaian Laporan Dana Alokasi Khusus tepat waktu | | | 436.218.000 | 423.016.400 | 97.43% |
| 12. | Kegiatan Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang APBD Kabupaten / Kota | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kab/Kota | Terbitnya Surat Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD Kab/Kota | - | | 615.625.500 | 614.986.400 | 99.90% |
| 13. | Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Perhitungan APBD Kabupaten / Kota * | Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota | Terbitnya Surat Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota | | - | 434.506.000 | 394.359.500 | 90.74% |
| 14. | Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas | Pemeliharaan Rumah Dinas dan Gedung Kantor. | Meningkatnya Kualitas Fisik Rumah Dinas dan Gedung Kantor milik Pemprov Jambi | | | 2.125.942.000 | 2.100.942.000 | 99.77% |
| 15. | Kegiatan Penilaian Asset Provinsi Jambi | Penilaian Aset Provinsi Jambi | Tersedianya Data Aset yang lebih akurat | Masih adanya aset yang belum memiliki nilai | Perlu ditingkatkan koordinasi dengan pihak lain yang terkait | 345.045.100 | 344.644.600 | 99,86% |
| 16. | Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Asset dan Penyusunan Laporan | Penyusunan Laporan Aset | Pengelolaan administrasi aset daerah tepat waktu | Keterlambatan pengiriman laporan dari SKPD | Meningkatkan koordinasi dengan SKPD | 275.388.000 | 275.259.300 | 99.95% |
| 17. | Kegiatan Peningkatan Sarana Pengelolaan Asset | Pengadaan sarana dan Prasarana peralatan dan perlengkapan gedung/kantor | Tersedianya sarana dan Prasarana gedung/kantor | | | 2.198.319.556 | 2.100.000.000 | 98.27% |
| 18. | Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah Provinsi Jambi | Inventarisasi Data Aset Daerah | Tersedianya Data Asset yang akurat | Masih adanya data aset yang belum akurat | Perlu adanya koordinasi dan rekonsiliasi data aset dengan pihak terkait | 1.208.335.932 | 1.201.499.118 | 99.43% |
| 19. | Kegiatan Pengadaan dan Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi | Pengadaan dan Pengamanan Aset Milik Pemprov Jambi | Terlaksananya Pengadaan dan Pengamanan Aset Milik Provinsi Jambi | | | 1.726.443.832 | 1.722.188.662 | 96.72% |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|--|-------------|-------------|--------|
| 20 | Kegiatan Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD | Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD, DKBMD dan DKPBMD | Tersedianya Data RKBMD dan RKPBMMD, DKBMD dan DKPBMD | Keterlambatan penyampaian data dari SKPD | Meningkatkan koordinasi dengan SKPD | 296.820.000 | 296.786.400 | 96.25% |
| 21 | Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Asset | Evaluasi Standarisasi Satuan Harga | Tersedianya Buku Standart Satuan Harga | Keterlambatan penyampaian data dari SKPD | Meningkatkan koordinasi dengan SKPD | 356.112.800 | 340.416.600 | 89.00% |
| 22 | Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Asset | Pembinaan Pengelolaan Asset | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Asset SKPD | Pemahaman SDM Pengelola Aset yang belum optimal | Penempatan SDM yang sesuai dengan kompetensi | 754.719.200 | 723.409.700 | 99.93% |
| 23 | Kegiatan Pemanfaatan Asset Pemerintah Provinsi Jambi | Pemanfaatan Asset | Terlaksananya Pengelolaan Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Provinsi Jambi | | | 735.066.880 | 734.541.380 | 99.56% |
| 24 | Kegiatan Penghapusan dan Pemindahtanganan | Penghapusan dan Pemindah tanganan Aset | Terlaksananya Penghapusan dan Pemindah Tanganan Aset | | | 848.961.000 | 631.347.300 | 74.37% |
| 25 | Kegiatan Pelayanan Administrasi Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah* | Tertib Administrasi Pengelolaan Asset | Meningkatnya Tertip Administrasi Pengelolaan Aset | | | 480.066.850 | 465.066.850 | 87.49% |

Evaluasi kinerja Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Provinsi/Kabupaten/Kota*)

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir periode RPJMD) | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2) | | | Target program / kegiatan RKPMD tahun berjalan (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan | | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|------|---|--|--|---|---|---|-----------------------|--|---|--|-----------------------|
| | | | | | Target RKPMD tahun (tahun n-2) | Realisasi RKPMD tahun (tahun n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun (tahun berjalan/n-1) | Tingkat capaian realisasi target s/d tahun (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9)* | 11* | 12 |
| 1 | WAJIB | | | | | | | | | | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir periode RPJMD) | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2) | | | Target program / kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan | | SKPD PENANGGUNG JAWAB | | |
|------|---|---|--|---|---|--|-----------------------|---|---|--|-----------------------|---------|-----------|
| | | | | | Target RKPd tahun (tahun n-2) | Realisasi RKPd tahun (tahun n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun (tahun berjalan/n-1) | Tingkat capaian realisasi target s/d tahun (%) | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9)* | 11* | 12 | | |
| 1 | 20 | | | | | | | | | | | | |
| | | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 02 | | | 100% | 45 % | 65 % | 60 % | 92,31% | 100% | 8.19% | 8.19% | Biro PAKD |
| 1 | 20 | 02 | 41 | | | | | | 80% | 100% | | 99.77% | Biro PAKD |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 14 | | | | | | | | 100% | | 201.85% | Biro PAKD |
| 1 | 20 | 14 | 02 | | | | | | | 100% | | 99.86% | Biro PAKD |
| 1 | 20 | 14 | 03 | | | | | | | 100% | | 99.95% | Biro PAKD |
| 1 | 20 | 14 | 04 | | | | | | | 100% | | 98.27% | Biro PAKD |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 20 | 41 | | | | | | | | 100% | | 24.34% | Biro PAKD |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) | Target capaian kinerja RPJMD Tahun (akhir periode RPJMD) | Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d dengan tahun (tahun n-3) | Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan tahun lalu (n-2) | | | Target program / kegiatan RKPd tahun berjalan (tahun n-1) | Perkiraan realisasi capaian target RPJMD sampai dengan tahun berjalan | | SKPD PENANGGUNG JAWAB |
|------|---|---|--|---|---|--|-----------------------|---|---|--|-----------------------|
| | | | | | Target RKPd tahun (tahun n-2) | Realisasi RKPd tahun (tahun n-2) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun (tahun berjalan/n-1) | Tingkat capaian realisasi target s/d tahun (%) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9)* | 11* | 12 |
| | | Asset dan Terwujudnya Pengelolaan Asset yang Profesional | | | | | | | | | |
| 1 | 20 41 01 | Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah Provinsi Jambi | Tertipnya Inventarisasi Asset Barang Milik Daerah Provinsi Jambi secara Akurat | | | | | 100% | | 99.43% | Biro PAKD |
| 1 | 20 41 02 | Kegiatan Pengadaan dan Pengamanan Asset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi | Terlaksananya pengadaan dan pengaman asset dari kerusakan dan gangguan pihak lain | | | | | 100% | | 96.27% | Biro PAKD |
| 1 | 20 41 03 | Kegiatan Penyusunan RKBMD dan RKPBMd | Terciptanya penyusunan rencana kebutuhan barang | | | | | 100% | | 96.25% | Biro PAKD |
| 1 | 20 41 04 | Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Asset | Terlaksananya evaluasi dan monitoring | | | | | 100% | | 89.00% | Biro PAKD |
| 1 | 20 41 05 | Sosialisasi Permendagri No. 17 Tahun 2007 dan PP No. 6 Tahun 2006 | Terlaksananya bintek pengelolaan asset | | | | | 100% | | | Biro PAKD |
| 1 | 20 41 06 | Kegiatan Pemanfaatan Asset Pemerintah Provinsi Jambi | Terciptanya penataan asset yang mempunyai nilai dapat berdaya guna dan berhasil guna (pinjam/sewa pakai) | | | | | 100% | | 99.56% | Biro PAKD |
| 1 | 20 41 07 | Kegiatan Penghapusan dan Pemindahtanganan | Terciptanya tertip penghapusan dan pemindahtanganan asset | | | | | 100% | | 74.37% | Biro PAKD |
| 1 | 20 41 08 | Kegiatan Pelayanan Administrasi Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah | Terciptanya tertip administrasi pengelolaan asset | | | | | 100% | | 87.49% | Biro PAKD |

Program dan Kegiatan SKPD
Provinsi Jambi
Tahun 2015.

NAMA SKPD : BIRO PENGELOLAAN ASSET DAN KEKAYAAN DAEARAH

lembardari ...

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan | Rencana Tahun 2015 | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016 | |
|------|---|---|--------------------|--|---|-----------------|--|---|
| | | | Lokasi | target capaian kinerja | Kebutuhan Dana/ pagu indikatif | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/ pagu indikatif |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | 20 | | | | | | | |
| | | Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | |
| 1 | 20 | 02 | | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aperatur | Terlaksananya kegiatan pemeliharaan dan peningkatan pengelolaan asset | Provinsi Jambi | Terpenuhinya pemeliharaan dan peningkatan pengelolaan asset | Terpenuhinya pemeliharaan dan peningkatan pengelolaan asset |
| 1 | 20 | 02 | 41 | Kegiatan Rehabilitas Sedang/berat Rumah Dinas | Terlaksananya Pemeliharaan Asset Milik Pemerintah Prov. Jambi dan Jumlah gedung yang Layak Pakai | Provinsi Jambi | Terpenuhinya Pemeliharaan Asset Milik Pemerintah Prov. Jambi dan Jumlah gedung yang Layak Pakai | Rp. 3.180.000.000,- |
| 1 | 20 | 14 | | Program Peningkatan Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah | Tertipnya penge lolaan asset | Provinsi Jambi | Tertipnya penge lolaan asset | |
| 1 | 20 | 14 | 02 | Kegiatan Penilaian Asset Provinsi Jambi | Terlaksananya Penilaian Asset | Provinsi Jambi | Terpenuhinya Penilaian Asset | Rp. 360.000.000,- |
| 1 | 20 | 14 | 03 | Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Asset dan Penyusunan Laporan | Terlaksananya Laporan Belanja Modal, Tersusunnya data rekonsiloisasi belanja modal dari seluruh SKPD dan Termanfaatkannya system Aplikasi penyusunan laporan setiap SKPD. | Provinsi Jambi | Terpenuhinya Laporan Belanja Modal, Tersusunnya data rekonsiloisasi belanja modal dari seluruh SKPD dan Termanfaatkannya system Aplikasi penyusunan laporan setiap SKPD. | Rp. 300.000.000,- |
| 1 | 20 | 14 | 04 | Kegiatan Peningkatan Sarana | Tersedianya Sarana dan | Provinsi | Terpenuhinya Sarana dan | Rp. 1.200.000.000,- |

| | | | | Pengelolaan Asset | Prasarana | Jambi | Prasarana | | | Prasarana | |
|---|----|----|----|---|--|----------------|---|----------------------|--|---|---------------------|
| 1 | 20 | 41 | | Program Pengelolaan Kekayaan Daerah | Terciptanya tertib Administrasi Pengelolaan Asset dan Terwujudnya Pengelolaan Asset yang Profesional | Provinsi Jambi | Terpenuhinya tertib Administrasi Pengelolaan Asset dan Terwujudnya Pengelolaan Asset yang Profesional | | | Terpenuhinya tertib Administrasi Pengelolaan Asset dan Terwujudnya Pengelolaan Asset yang Profesional | |
| 1 | 20 | 41 | 01 | Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah Provinsi Jambi | Tertipnya Inventarisasi Asset Barang Milik Daerah Provinsi Jambi secara Akurat | Provinsi Jambi | Tertipnya Inventarisasi Asset Barang Milik Daerah Provinsi Jambi secara Akurat | Rp. 600.000.000,- | | Tertipnya Inventarisasi Asset Barang Milik Daerah Provinsi Jambi secara Akurat | Rp.800.000.000,- |
| 1 | 20 | 41 | 02 | Kegiatan Pengadaan dan Pengamanan Asset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi | Terlaksananya pengadaan dan pengaman asset dari kerusakan dan gangguan pihak lain | Provinsi Jambi | Terpenuhinya pengadaan dan pengaman asset dari kerusakan dan gangguan pihak lain | Rp.3.500.000.000,- | | Terpenuhinya pengadaan dan pengaman asset dari kerusakan dan gangguan pihak lain | Rp. 4.000.000.000,- |
| 1 | 20 | 41 | 03 | Kegiatan Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD | Terciptanya penyusunan rencana kebutuhan barang | Provinsi Jambi | Terpenuhinya penyusunan rencana kebutuhan barang | Rp. Rp.200.000.000,- | | Terpenuhinya penyusunan rencana kebutuhan barang | Rp.250.000.000,- |
| 1 | 20 | 41 | 04 | Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Asset | Terlaksananya evaluasi, monitoring dan tersusunnya standar satuan harga untuk SKPD | Provinsi Jambi | Terpenuhinya evaluasi, monitoring dan tersusunnya standar satuan harga untuk SKPD | Rp. Rp.250.000.000 | | Terpenuhinya evaluasi, monitoring dan tersusunnya standar satuan harga untuk SKPD | Rp.300.000.000,- |
| 1 | 20 | 41 | 05 | Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Asset dan Kekayaan daerah | Terlaksananya bintek pengelolaan asset | Provinsi Jambi | Terlaksananya bintek pengelolaan asset | Rp. 400.000.000,- | | Terlaksananya bintek pengelolaan asset | Rp. 460.000.000,- |
| 1 | 20 | 41 | 06 | Kegiatan Pemanfaatan Asset Pemerintah Provinsi Jambi | Terciptanya penataan asset yang mempunyai nilai dapat berdaya guna dan berhasil guna (pinjam/sewa pakai) | Provinsi Jambi | Terciptanya penataan asset yang mempunyai nilai dapat berdaya guna dan berhasil guna (pinjam/sewa) | Rp. 200.000.000,- | | Terciptanya penataan asset yang mempunyai nilai dapat berdaya guna dan berhasil guna (pinjam/sewa) | Rp. 250.000.000,- |
| 1 | 20 | 41 | 07 | Kegiatan Penghapusan dan Pemindahtanganan | Terciptanya tertip penghapusan dan pemindahtanganan asset | Provinsi Jambi | Terpenuhinya tertip penghapusan dan pemindahtanganan asset | Rp. 200.000.000,- | | Terpenuhinya tertip penghapusan dan pemindahtanganan asset | Rp. 200.000.000,- |
| 1 | 20 | 41 | 08 | Kegiatan Pelayanan Administrasi Pengelolaan Asset dan Kekayaan Daerah | Terciptanya tertip administrasi pengelolaan asset | Provinsi Jambi | Terpenuhinya tertip administrasi pengelolaan asset | Rp. 900.000.000,- | | Terpenuhinya tertip administrasi pengelolaan asset | Rp. 950.000.000,- |

BAB III

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Jambi Tahun 2015 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Jambi 2010 - 2015 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Provinsi Jambi serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui RKPD Pemerintah Provinsi Jambi dan Tahun 2015.

Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Jambi merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2015.

Dengan adanya Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Jambi, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Jambi maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Jambi, Mei 2014

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah

MUSLIM RIZAL, SE.M.Si

Pembina

NIP. 19600416 198403 1 002

**Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Jambi Tahun 2015**

Nama SKPD: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAMBI

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp) | Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp) | Jenis Kegiatan | | SKPD Penanggung |
|-------------|---|------------------|----------------|----------------|--|--------|-------------------|---------|----------------|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------|-------|-----------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | 1/2/3 | 1/2/3 | |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 20 05 01 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | | | Provinsi Jambi | Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan lancar | | | | | | 1.891.799.980 | 2.080.979.978 | | | |
| 20 05 01 01 | Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat | | | Provinsi Jambi | | 100% | | | | Terlaksananya Administrasi Surat Menyurat | 30.000.000 | 33.000.000 | 1 | 1 | |
| 20 05 01 02 | Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik | | | Provinsi Jambi | | 100% | | 1 tahun | | Terlaksananya pelayanan listrik, air, dan telepon | 87.400.000 | 96.140.000 | 1 | 1 | |
| 20 05 01 07 | Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan | | | Provinsi Jambi | | 100% | | | | | 341.658.000 | 375.823.800 | 1 | 1 | |
| 20 05 01 08 | Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor | | | Provinsi Jambi | | 100% | | | | | 60.000.000 | 66.000.000 | 1 | 1 | |
| 20 05 01 10 | Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor | | | Provinsi Jambi | | 100% | | | | | 541.637.350 | 595.801.085 | 1 | 1 | |
| 20 05 01 11 | Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | | | Provinsi Jambi | | 100% | | | | | 59.499.750 | 65.449.725 | 1 | 1 | |
| 20 05 01 12 | Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | | | Provinsi Jambi | | 100% | | | | | 13.940.000 | 15.334.000 | 1 | 1 | |
| 20 05 01 15 | Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | | | Provinsi Jambi | | 100% | | | | | 20.000.000 | 22.000.000 | 1 | 1 | |
| 20 05 01 17 | Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman | | | Provinsi Jambi | | 100% | | | | | 180.000.000 | 198.000.000 | 1 | 1 | |
| 20 05 01 18 | Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah | | | Provinsi Jambi | | 100% | | | | | 557.664.880 | 613.431.368 | 1 | 1 | |
| 20 05 02 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | | | Provinsi Jambi | | 100% | | | | | 2.898.260.050 | 1.862.553.055 | | | |
| 20 05 02 05 | Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional | | | Provinsi Jambi | Tersedianya sarana dan prasarana aparatur yang memadai | 100% | | | | | 1.205.030.000 | 1.325.533.000 | 1 | 1 | |
| 20 05 02 07 | Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor | | | Provinsi Jambi | | 100% | | | | | 197.500.000 | 217.250.000 | 1 | 1 | |
| 20 05 02 09 | Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor | | | Provinsi Jambi | | 100% | | | | | 38.500.000 | 42.350.000 | 1 | 1 | |
| 20 05 02 22 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor | | | Provinsi Jambi | | 100% | | | | | 15.000.000 | 16.500.000 | 1 | 1 | |
| 20 05 02 24 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | | | Provinsi Jambi | | 100% | | | | | 273.500.000 | 300.850.000 | 1 | 1 | |
| 20 05 02 28 | Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor | | | Provinsi Jambi | | 100% | | | | | 61.770.950 | 67.948.045 | 1 | 1 | |
| 20 05 02 41 | Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas | | | Provinsi Jambi | | 100% | | | | | 1.106.959.100 | 1.217.655.010 | | | |
| 20 05 03 | Program peningkatan disiplin aparatur | | | | Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur | | | | | | 71.200.000 | 78.320.000 | | | |
| 20 05 03 01 | Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya | | | Provinsi Jambi | | 100% | | | | | 71.200.000 | 78.320.000 | 1 | 1 | |
| 20 05 05 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | | | | | | | | | | 371.500.000 | 993.918.200 | | | |
| 20 05 05 01 | Kegiatan Pendidikan dan pelatihan formal | | | Provinsi Jambi | Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Aparatur | 100% | | 139 | | | 70.000.000 | 77.000.000 | 1 | 1 | |
| 20 05 05 10 | Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur Dalam Pengelolaan Aset Daerah (UPTB) | | | Provinsi Jambi | | 100% | | | | | 301.500.000 | 331.650.000 | 1 | 1 | |
| 20 05 06 | Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan | | | | | | | | | | 266.031.000 | 292.634.100 | | | |
| 20 05 06 01 | Kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD | | | Provinsi Jambi | Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | | | 266.031.000 | 292.634.100 | 1 | 1 | |

| Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan | Prioritas Daerah | Sasaran Daerah | Lokasi | Indikator Kinerja | | | | | | Pagu Indikatif Tahun 2015 (Rp) | Perkiraan Maju Tahun 2016 (Rp) | Jenis Kegiatan 1/2/3 | SKPD Penanggung |
|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|---|--------|---|-----------------|---|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | | Hasil Program | | Keluaran Kegiatan | | Hasil Kegiatan | | | | | |
| | | | | | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | Tolak Ukur | Target | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 05 17 | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah | | | | | | | | | | 5.062.004.100 | 5.568.204.510 | | |
| 20 05 17 06 | Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD | | | Provinsi Jambi | | 100% | Jumlah Perda APBD dan APBD Perubahan | 1 (satu) paket. | Terlaksananya Penyusunan APBD sesuai aturan | 1 Paket | 703.143.300 | 773.457.630 | 1 | 1 |
| 20 05 17 08 | Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD | | | Provinsi Jambi | Terwujudnya penyusunan dasar hukum Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari Program Anggaran hingga Pertanggungjawaban. | 100% | Jumlah Pergub tentang Penjabaran APBD dan APBD Perubahan | 1 (satu) paket. | Terlaksananya Penyusunan APBD Perubahan sesuai aturan | 1 Paket | 461.851.000 | 508.036.100 | 1 | 1 |
| 20 05 17 10 | Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD | | | Provinsi Jambi | | 100% | Jumlah Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | 1 (satu) paket. | Terlaksananya Penyusunan Perda Pertanggungjawaban | 1 Paket | 332.486.950 | 365.735.645 | 1 | 1 |
| 20 05 17 13 | Kegiatan Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah | | | Provinsi Jambi | | 100% | Terpeliharanya Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah | 24 SKPD | Terlaksananya Pemeliharaan Sistem Informasi Pengelolaan | 1 Paket | 656.036.000 | 721.639.600 | 1 | 1 |
| 20 05 17 14 | Kegiatan Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah | | | Provinsi Jambi | Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Pengelolaan Keuangan Daerah dan Laporan Keuangan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. | 100% | Tersosialisasikannya paket regulasi tentang pengelolaan Keuangan Daerah | 46 SKPD | Terlaksananya sosialisasi pket regulasi tentang pengelolaan | 46 SKPD | 686.758.900 | 755.434.790 | 1 | 1 |
| 20 05 17 22 | Kegiatan Peningkatan Manajemen Unit Akuntansi Wilayah | | | Provinsi Jambi | | 100% | Terwujudnya Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Dana Dekon dan TP | 1 (satu) Paket | Terlaksananya penyusunan Laporan Keuangan dan Dekon TP | 1 (satu) Paket | 261.799.050 | 287.978.955 | 1 | 1 |
| 20 05 17 24 | Kegiatan Pengelolaan Administrasi TUKD Belanja tidak langsung | | | Provinsi Jambi | Terwujudnya Peningkatan Pengetahuan Aparatur dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. | 100% | Terwujudnya pengelolaan administrasi TUKD BTL sesuai aturan | 46 SKPD | Terlaksananya pengelolaan administrasi TUKD BTL sesuai aturan. | 46 SKPD | 365.165.450 | 401.681.995 | 1 | 1 |
| 20 05 17 25 | Kegiatan Pengelolaan Perbendaharaan dan Kas Daerah | | | Provinsi Jambi | | 100% | Meningkatnya Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Daerah | 1 (satu) Paket | Terlaksananya pelayanan perbendaharaan dan KASDA | | 219.173.250 | 241.090.575 | 1 | 1 |
| 20 05 17 26 | Kegiatan Pengelolaan Administrasi TUKD Belanja Langsung | | | Provinsi Jambi | | 100% | Terwujudnya pengelolaan administrasi TUKD BL sesuai aturan | 1 (satu) Paket | Terlaksananya pengelolaan administrasi TUKD TL sesuai | 1 (satu) Paket | 502.816.950 | 553.098.645 | 1 | 1 |
| 20 05 17 31 | Kegiatan Optimalisasi Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) | | | Provinsi Jambi | | 100% | Tersedianya Laporan Pelaksanaan DAK khususnya infrastruktur | 1 (satu) paket. | Laporan Pelaksanaan DAK khususnya infrastruktur | 1 (satu) paket. | 661.273.250 | 727.400.575 | 1 | 1 |
| 20 05 17 32 | Kegiatan Administrasi TP-TGR (UPTB) | | | Provinsi Jambi | | 100% | Terlaksananya kegiatan Penatausahaan TP-TGR | 1 (satu) paket. | Laporan Kegiatan Penatausahaan TP-TGR | 1 (satu) paket. | 211.500.000 | 232.650.000 | 1 | 1 |
| 20 05 18 | Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota | | | | | | | | | | 931.403.500 | 1.024.543.850 | | |
| 20 05 18 01 | Kegiatan Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten/kota | | | Provinsi Jambi | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota. | 100% | Tersusunnya Keputusan Gubernur tentang Evaluasi APBD Kab/Kota | 11 Kab/ Kota | Terlaksananya Evaluasi APBD Kab/Kota | 11 Kab/ Kota | 572.354.500 | 629.589.950 | 1 | 1 |
| 20 05 18 06 | Kegiatan Pembinaan dan evaluasi perhitungan APBD kab/kota | | | Provinsi Jambi | | 100% | Tersusunnya Keputusan Gubernur tentang Pertanggung Jawaban APBD Kab/Kota | 11 Kab/ Kota | Terlaksananya Pembinaan dan evaluasi perhitungan APBD Kab/Kota | 11 Kab/ Kota | 359.049.000 | 394.953.900 | 1 | 1 |
| 20 05 41 | Program pengelolaan kekayaan daerah | | | | | | | | | | 6.751.524.415 | 7.426.676.857 | | |
| 20 05 41 01 | Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah provinsi jambi | | | Provinsi Jambi | Meningkatnya Inventarisasi Aset | 95% | Terlaksananya Inventarisasi Aset | Rp 2 triliun | Inventarisasi Aset Pemerintah Provinsi | Rp 2 triliun | 699.100.600 | 769.010.660 | 1 | 1 |
| 20 05 41 02 | Kegiatan Pengadaan dan Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Provinsi Jambi | | | Provinsi Jambi | Meningkatnya Pengadaan dan Pengamanan Aset Tanah Milik Pemprov Jambi | 95% | Terlaksananya Pengadaan dan Pengamanan Aset Tanah Milik Provinsi Jambi | 6 (enam) paket | Tersedianya pengadaan dan pengamanan Aset Tanah Milik Pemprov Jambi | 6 (enam) paket | 1.579.869.660 | 1.737.856.626 | 1 | 1 |
| 20 05 41 03 | Kegiatan Penyusunan RKBMD dan RKPMBD | | | Provinsi Jambi | Meningkatnya Penyusunan RKBMD dan RKPMBD | 100% | Terlaksananya Penyusunan Buku RKBMD dan RKPMBD | 46 SKPD | Terlaksananya penyusunan Buku RKBMD dan RKPMBD | 46 SKPD | 381.528.900 | 419.681.790 | 1 | 1 |
| 20 05 41 04 | Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Aset | | | Provinsi Jambi | Meningkatnya kualitas Standar Satuan Harga | 100% | Terlaksananya Evaluasi dan Pencetakan Buku Standar Satuan Harga | 150 buku | Tersedianya Buku Standar Satuan Harga | 200 buku | 370.269.750 | 407.296.725 | 1 | 1 |
| 20 05 41 05 | Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Aset | | | Provinsi Jambi | Meningkatnya Tertib Pengelolaan Aset | 100% | Tersedianya Tenaga Pengelolaan Aset yang terlatih | 92 orang | Terlaksananya pembinaan Pengelolaan Aset | 46 SKPD | 511.734.750 | 562.908.225 | 1 | 1 |
| 20 05 41 06 | Kegiatan Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi Jambi | | | Provinsi Jambi | Meningkatnya Pemeliharaan Aset Milik Pemerintah Provinsi Jambi | 95% | Jumlah Aset yang dimanfaatkan | 46 SKPD | Terlaksananya pemanfaatan dan pemeliharaan aset | 46 SKPD | 798.326.000 | 878.158.600 | 1 | 1 |
| 20 05 41 07 | Kegiatan Penghapusan dan Pemindahtanganan | | | Provinsi Jambi | Meningkatnya Tertib Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset | 95% | Terciptanya Tertib Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset | 46 SKPD | Terlaksananya penghapusan dan pemindahtanganan aset | 46 SKPD | 442.633.400 | 486.896.740 | 1 | 1 |
| 20 05 41 08 | Kegiatan Penilaian Aset Provinsi Jambi | | | Provinsi Jambi | Meningkatnya penilaian Barang Milik Daerah | 100% | Jumlah Penilaian terhadap Barang Milik Daerah SKPD | 46 SKPD | Terlaksananya Penilaian terhadap Barang Milik Daerah SKPD | | 862.806.835 | 949.087.519 | 1 | 1 |
| 20 05 41 09 | Kegiatan Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Penyusunan Laporan | | | Provinsi Jambi | Meningkatnya Pengelolaan Aset dan Pengembalian Kerugian Daerah | 100% | Tersusunnya Laporan Aset pada SKPD | 46 SKPD | terbitnya buku lap. Belanja modal | 12 Bulan | 204.504.520 | 224.954.972 | 1 | 1 |
| 20 05 41 10 | Kegiatan Peningkatan Sarana Pengelolaan Aset | | | Provinsi Jambi | Meningkatnya sarana dan prasarana | 100% | Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana | 1 (satu) paket. | Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana | | 900.750.000 | 990.825.000 | 1 | 1 |
| J u m l a h | | | | | | | | | | | 18.243.723.045 | 19.327.830.550 | | |

Jambi, Juni 2014
Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Muslim Rizal, SE, M.Si
NIP 19600416 198403 1 002